

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT BADAN DAN PENYAKIT
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**FAHMI ANDREAN RAMADHANI
NIM : 145010100111072**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT BADAN DAN PENYAKIT
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975)****FAHMI ANDREAN RAMADHANI
NIM : 145010100111072**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Suhariningsih, SH.SU.
NIP. 19500526 198002 2 001

Fitri Hidayat, SH.MH.
NIP. 201208 850707 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, SH., LLM.
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 28 Juni 2018

Yang menyatakan,

Fahmi Andrean Ramadhani
NIM. 145010100111072



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fahmi Andrean Ramadhani panggilan Fahmi lahir di Magetan pada tanggal 15 Februari 1996 dari pasangan suami istri Bapak Eko Wisnu Susanto dan R.R. Emeng Deogaon Marthawangi Kusuma Dewi. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Dr. Soetomo RT 05 RW 02 Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 3 Maospati lulus tahun 2009, SMP Negeri 1 Maospati lulus tahun 2011, SMA Negeri 1 Maospati lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT BADAN DAN PENYAKIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

(Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975)

**Fahmi Andrean Ramadhani, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H, S.U, Fitri
Hidayat, S.H, M.H**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: fahmiandrian25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berfokus pada kriteria cacat badan dan penyakit yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berlakunya PP nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Namun baik dalam Undang-Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kriteria dari cacat badan dan penyakit yang dimaksud agar dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-Undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kesimpulannya adalah kriteria cacat badan atau penyakit yang dimaksud adalah cacat badan atau penyandang disabilitas dengan jenis penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental dan penyakit yang menyebabkan sakit jenis *disease* yang dapat menghalangi seseorang dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri atau penyakit berbahaya yang dapat menular ke pasangan sehingga bukan saja membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan pasangan seperti HIV & AIDS, yang dibuktikan dengan keterangan dokter.

Kata Kunci : Cacat Badan, Penyakit, Perceraian

Juridical Analysis over Physical Disabilities and Diseases as a Reason of Divorce**(Article 19 e Government Regulation Number 9 of 1975)****Fahmi Andrean Ramadhani, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Fitri Hidayat, S.H.,
M.H**

Faculty of Law Universitas Brawijaya

Email: fahmiandean25@gmail.com**ABSTRACT**

This research is mainly focused on criteria of physical disabilities and diseases as a reason of divorce. This research was initiated with the study of Government Regulation Number 9 of 1975 stating that any disabilities or diseases that hamper a husband or a wife from performing their responsibilities can be used as a reason of a divorce. However either in Law Number 1 of 1974 on Marriage or in Government Regulation Number 9 of 1975, there is no further explanation over criteria of physical disabilities and diseases as intended as a reason of divorce. This research employed normative-juridical method with conceptual and statute approaches. The research result concludes that the criteria of the disabilities comprise physical disability and mental disability, while the diseases are defined as any diseases that could impede husbands or wives to perform their responsibilities or any communicable diseases that can also harm spouses such as HIV and AIDS, in which the diseases must be medically proven.

Keywords: physical disabilities, diseases, divorce

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Fitri Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan doa tiada henti agar skripsi ini dapat selesai
6. Abigail Leota Candri Anjani yang selalu setia dan sabar menemani dan memberikan semangat selama penulis mengerjakan penelitian skripsi ini
7. Kepada teman-temanku Okki, Satrio, Naja, Brahmantyo, Wildan, Alamsyah, Kendra, Ayak, Ivo, Hasna, Indah, dan Nanda yang telah bersedia membantu dalam bentuk apapun selama pengerjaan skripsi ini
8. Kepada teman-teman Kompeni 2017 yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan tugas skripsi
9. Kepada teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa untuk sukses dan lancarnya penelitian hukum ini

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 28 Juni 2018

Fahmi Andrean Ramadhani



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Tentang Hukum Keluarga	12
B. Kajian Tentang Hukum Perkawinan	24
C. Kajian Tentang Perceraian	31
D. Kajian Tentang Penyakit dan Cacat Badan atau Disabilitas	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
F. Definisi Konseptual	46
G. Sistematika Penulisan	47
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Analisa Cacat Badan dan Penyakit dengan Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban sebagai Suami/Istri Sesuai Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975	48
B. Kriteria Cacat Badan Atau Penyakit yang Dapat Dijadikan Alasan Perceraian	64
C. Rumusan Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 yang Sesuai Setelah Diketahui Kriteria dari Cacat Badan dan Penyakit dengan Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Suami/Istri	83
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat pernikahan, maka perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pengasuhan anak, perceraian, perwalian, dan lain-lain¹. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga semua hal yang meliputi perkawinan mulai dari terjadinya perkawinan hingga putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan tujuan me-mbentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas Ketuhanan dan bukan hanya sekedar ikatan keperdataan antar laki-laki dan

¹ Asep Saepudin, Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Arifin, **Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis**, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 23-24

² Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

perempuan. Sedangkan menurut Pasal 2 KHI perkawinan menurut hukum Islam adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah”.³ Dalam KHI perkawinan merupakan ibadah yang dilaksanakan untuk mentaati perintah Allah SWT.

Namun dalam membina rumah tangga perkawinan tidak selamanya berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau KHI. Sehingga perceraian menjadi solusi untuk mengakhiri perkawinan tersebut. Istilah perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Putusnya perkawinan”. Jika merujuk pada pengertian perkawinan pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut⁴.

Perkawinan dapat putus karena : a. kematian; b. perceraian, dan; c. atas keputusan pengadilan⁵. Adapun salah satu alasan perceraian adalah :⁶

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”.

³ Kompilasi Hukum Islam

⁴ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 18

⁵ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38

⁶ PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 e

Dengan begitu, cacat badan atau penyakit pun dapat menjadi sebuah alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan perceraian karena apabila salah satu mendapat cacat badan atau sakit maka hal ini bisa membuat salah satu dari suami atau istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.

Tidak diperolehnya keturunan karena ketidakmampuan salah satu pihak, bukan merupakan sebab resmi bercerai. Apabila terjadi, itu hanyalah hak untuk memilih, yang dapat digunakan atau tidak. Jadi, jelaslah bahwa faktor ini sangat memengaruhi manusia, di samping faktor-faktor lain untuk melakukan perkawinan⁷

Namun PP No. 9 tahun 1975 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang dapat mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) kata “cacat” berarti : kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna⁸. Pemaknaan cacat atau disabilitas juga dapat ditemui dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁹ Dari definisi tersebut diketahui terdapat beberapa jenis penyandang disabilitas yaitu yang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan

⁷ Mustofa Hasan, **Pengantar Hukum Keluarga**, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 25.

⁸ <https://kbbi.web.id/cacat>

⁹ Pasal 1 Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

intelektual, keterbatasan mental, dan/atau keterbatasan sensorik. Dalam hal ini yang menjadi fokus peneliti adalah keterbatasan fisik, karena sesuai dengan rumusan Pasal 19 e PP No. tahun 1975 yang menyebutkan bahwa cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai.

Sedangkan “penyakit” menurut KBBI berarti : sesuatu yg menyebabkan terjadinya gangguan pd makhluk hidup; (2) gangguan kesehatan yg disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan sistem fatal atau jaringan pada organ tubuh (pd makhluk hidup)¹⁰. Lebih lanjut terdapat berbagai pengertian penyakit menurut beberapa ahli :

1. Dr. Beate Jacob

Menurut Dr. Beate Jacob, penyakit merupakan sebuah penyimpangan dari kondisi tubuh normal menuju ke ketidakharmonisan jiwa.

2. Thomas Timmreck

Penyakit dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana terdapat gangguan terhadap bentuk ataupun fungsi salah satu bagian tubuh yang menyebabkan tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan normal.

3. Azizan Haji Baharuddin

Penyakit dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang disebabkan oleh rusaknya keseimbangan fungsi tubuh dan beberapa bagian badan manusia.

4. Dr. Eko Dudiarto

Penyakit merupakan jejalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk beraksi secara tepat terhadap setiap tekanan ataupun rangsangan yang

¹⁰ <http://kamusbahasaIndonesia.org/penyakit/mirip>

menimbulkan gangguan pada fungsi ataupun struktur organ dan sistem di dalam tubuh.

Dalam peraturan perundang-undangan belum dijelaskan secara eksplisit apa itu penyakit, hanya terdapat pengertian kesehatan dalam UU No. 36 tahun 2009 yaitu dalam Pasal 1 menyebutkan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Pada rumusan Pasal 19 (e) PP No. 9 tahun 1975 cacat badan dan penyakit yang akan digunakan sebagai alasan perceraian harus memiliki akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Kewajiban sebagai suami atau istri yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

Pasal 34

- (1.) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2.) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- (3.) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan.¹¹

¹¹ Pasal 34 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara umum hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan maka sejak itu suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban tertentu, begitu pula sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu dan kewajiban tertentu pula¹².

Terdapat beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pertama, Putusan Pengadilan Nomor 553/Pdt.G/2008/PA.NGJ. Dalam putusan ini penggugat dan tergugat telah menikah sejak tahun 2000 dan belum dikaruniai keturunan sampai gugatan diajukan. Awalnya pengugat dan tergugat hidup harmonis hingga pada awal tahun 2007 tergugat mengalami kecelakaan sepeda motor dan menyebabkan tergugat mengalami kelumpuhan. Setelah dirawat di rumah sakit tergugat tidak lantas pulang ke rumahnya bersama dengan penggugat melainkan dibawa pulang ke rumah orang tua tergugat karena dilarang oleh orang tua tergugat. Karena penggugat dan tergugat sudah memiliki rumah sendiri maka penggugat berniat meminta tergugat untuk pulang ke rumah bersama penggugat namun tergugat tidak mau dan bahkan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian. Sejak saat itu tergugat tidak pernah pulang selama 9 bulan dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Kemudian Hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutus perkara tersebut dengan pertimbangan karena tergugat mengalami kelumpuhan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

¹² A. Ma'mun Rauf, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Hukum Islam II)**, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LEPPEN) Universitas Muslim Indonesia, 1990, hlm.93.

Kedua, Putusan Pengadilan Nomor 1156/Pdt.G/2012/PAJS. Dalam putusan ini penggugat dan tergugat telah menikah selama 1 tahun tetapi tidak pernah sama sekali melakukan hubungan suami istri. Terlebih lagi tergugat juga tidak pernah memberi nafkah secara finansial kepada penggugat sejak mulai menikah sampai gugatan diajukan. Selama pernikahan tergugat juga sering bersikap kasar terhadap penggugat. Diketahui pula dari para saksi bahwa ternyata tergugat adalah seorang homoseksual dan telah diakui pula oleh tergugat. Dalam kondisi seperti itu akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian. Tetapi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus perkara tersebut dengan pertimbangan terjadi perselisihan terus menerus antara suami dan istri dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketiga, Putusan Pengadilan Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2011 terjadi perselisihan yang dikarenakan tergugat membohongi penggugat dimana tergugat bukan laki-laki tapi seorang waria dan berdandan seperti perempuan, tergugat sering marah-marah, kasar, kurang memperhatikan penggugat beserta anaknya. Ketika melakukan hubungan suami istri nafsu tergugat tidak ada, dan sering menggunakan obat-obatan pendukung. Jika berhubungan tergugat meminta dari belakang (dubur). Tetapi Hakim Pengadilan Agama Malang juga memutus perkara tersebut dengan pertimbangan terjadi perselisihan terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Keempat, pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : 27/Pdt.G/2010/PA.Bky, pasangan suami istri telah menikah sejak tahun 2006 dan belum dikaruniai keturunan, lalu pada tahun 2008 pihak suami sebagai tergugat mulai menderita penyakit impotensi sehingga mengganggu hubungan batin antara pihak suami sebagai tergugat dan pihak istri sebagai penggugat. Dan penggugat telah menyarankan kepada tergugat untuk berobat, namun setelah dalam tempo 2 bulan ternyata penyakit tak kunjung sembuh. Setelah kejadian tersebut, sejak bulan Januari 2009 tergugat membawa penggugat ke orang tuanya dengan alasan penyakit tergugat yang belum sembuh, dan sejak gugatan diajukan sudah kurang lebih 1 tahun tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada penggugat.

Namun hakim juga memutus perkara tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa bahwa kedua mempelai terlibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus, bukan dengan pertimbangan bahwa pihak suami memiliki penyakit atau cacat badan yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami. Sedangkan sudah jelas dalam Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 bahwa cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dapat digunakan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian. Dalam kasus tersebut juga tidak disertakan bukti tertulis bahwa pihak suami menderita impotensi, karena tidak ditentukan pula dalam perundang-undangan tentang kriteria atau persyaratan apa saja sehingga seseorang bisa dikatakan memiliki penyakit atau cacat badan yang menghalangi atau menjadi tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **ANALISIS YURIDIS TERHADAP CACAT BADAN DAN PENYAKIT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

TABEL

Orisinalitas Penelitian

Peneliti	Judul	Tahun	Rumusan Masalah	Keterangan
Tri Wahyuni (Universitas Brawijaya)	ANALISIS YURIDIS GUGATAN CERAI PADA PUTUSAN NOMOR 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg TENTANG ALASAN SUAMI SEORANG	2013	Bagaimana analisis hukum terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri pada putusan Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg dengan alasan suami seorang	Peneliti ingin meneliti apa kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat dijadikan alasan perceraian, yang mana pada penelitian sebelumnya hanya membahas bagaimana alasan perceraian karena suami seorang waria dianalisis menurut hukum perkawinan

	<p>“WARIA” SEHINGGA MENYEBABKA N CEKCOK TERUS- MENERUS (<i>ONHEELBARE TWEESPALT</i>)</p>		<p>“waria” menurut hukum perkawinan di Indonesia?</p>	<p>di Indonesia. Waria dan impotensi merupakan 2 hal yang berbeda meskipun sama-sama dapat menyebabkan seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.</p>
--	--	--	---	--

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dari permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut :

1. Apa kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat dijadikan alasan perceraian ?
2. Bagaimana rumusan pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 yang sesuai setelah diketahui kriteria dari cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apa kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian.
2. Untuk menganalisis bagaimana rumusan Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 yang sesuai setelah diketahui kriteria dari cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri tersebut ?



D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum perdata, khususnya tentang hal-hal yang terkait dengan perceraian

2. Secara Praktis

- a. *Bagi Masyarakat*

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai alasan perceraian karena penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, agar masyarakat yang ingin mengajukan perceraian dengan alasan tersebut dapat lebih memahami dan mengerti maksud dari pasal tersebut.

- b. *Bagi Hakim*

Dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi hakim untuk memutus perkara perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Hukum Keluarga

1. Pengertian Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierecht* (belanda) atau *law of familie* (inggris). Istilah keluarga dalam arti sempit berarti suami, anak, dan istri. Sedangkan dalam arti luas istilah keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.

Adapun pendapat-pendapat lain terkait pengertian hukum keluarga adalah sebagai berikut:

a. Van Apeldoorn

"Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga".

b. C.S.T Kansil

"Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan".

c. R.Subekti

"Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan".

d. Rachmadi Usman

“Hukum kekeluargaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan”.

e. Djaja S. Meliala

“Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga karena terjadinya perkawinan”.

f. Sudarsono

“Hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan”.

Jika dikaji pendapat para ahli di atas terkait pengertian hukum keluarga, ada dua hal pokok yang menjadi aspek penting dalam pendapat mereka, yaitu hubungan sedarah dan perkawinan.

Adapun pertalian keluarga karena keturunan disebut *keluarga sedarah*, artinya sanak saudara yang memiliki nenek moyang yang sama. Keluarga sedarah ini lalu ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut *matrinial* dan ada yang ditarik menurut garis ibu dan bapak yang disebut *parental* atau *bilateral*.

Pertalian keluarga karena perkawinan disebut *keluarga semenda*, artinya hubungan keluarga atau sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara dari suami dan sanak saudara dari istri. Sedangkan pertalian keluarga karena adat disebut

keluarga adat, artinya pertalian keluarga tersebut terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat dari adat yang sama.

2. Sumber Hukum Keluarga

Pada dasarnya sumber hukum keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis yaitu segala bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis yaitu hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk peraturan tertulis yang mengatur tentang hukum keluarga, yaitu sebagai berikut:¹

- a. *Burgerlijk Wetboek* / Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).
- b. Peraturan perkawinan campuran (*regelijk op de gemengdehuwelijck*), Stb. 1898 Nomor 158.
- c. Ordonansi perkawinan indonesia, kristen, jawa, minahasa, dan ambon, Stb. 1933 Nomor 74.
- d. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk (beragama Islam).
- e. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹ Komariah, **Hukum Perdata**, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008

- f. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- g. PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- h. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (hukum ini berlaku bagi warga yang beragama Islam).

1. Asas-Asas Hukum Keluarga

Berdasarkan analisa yang merujuk kepada KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada beberapa asas yang berlaku dalam hukum keluarga, yaitu sebagai berikut: ²

a. Asas Monogami

Berarti seorang pria/suami hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

b. Asas Konsensual

Berarti suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan dan tanpa paksaan antara calon pasangan suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan.

c. Asas Persatuan Bulat

Adalah suatu asas yang berarti antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya baik harta dari pihak suami maupun harta dari pihak istri.

² Riduan Syahrani, **Seluk-beluk Asas-asas Hukum Perdata**, PT Alumni, Banjarmasin, 2006

d. Asas Proporsional

Berarti hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan di masyarakat.

e. Asas tak dapat dibagi-bagi

Adalah suatu asas yang menegaskan bahwa dalam tiap peristiwa perwalian hanya terdapat seorang wali. Dalam keberlakuan asas ini ada dua pengecualian, yaitu sebagai berikut:

a. Jika suatu perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup lebih lama maka ketika kawin lagi, suaminya otomatis menjadi wali serta/ wali peserta.

b. Jika sampa ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang dari anak di bawah umur diluar Indonesia.

f. Asas prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya.

Berarti seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus memiliki mental dan kondisi jiwa yang sehat.

g. Asas Monogami Terbuka / Poligami Terbatas

Berarti seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri dengan syarat harus mendapat izin dari pengadilan setelah sebelumnya mendapat izin dari istri dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ketat.

h. Asas Perkawinan Agama

Artinya suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. (Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

i. Asas Perkawinan Sipil

Berarti suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat sipil (kantor catatan sipil), perkawinan secara agama belum berakibat sahny suatu perkawinan secara hukum negara karena tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat sipil.

4. Ruang Lingkup Hukum Keluarga

Berdasarkan bahasan mengenai pengertian hukum keluarga di atas, kita dapat mengetahui apa saja ruang lingkup hukum keluarga. Adapun ruang lingkup hukum keluarga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkawinan
- b. Perceraian
- c. Harta benda dalam perkawinan
- d. Kekuasaan orang tua
- e. Pengampuan
- f. Perwalian

Namun terlepas dari hal yang diatur dalam hukum keluarga, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam keluarga menjadi fokus perhatian dalam kajian hukum keluarga.

5. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah suatu produk hukum yang timbul karena adanya suatu ikatan perkawinan. Adapun perkawinan itu adalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Yang dimaksud hak adalah segala sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena terjadinya perkawinan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.

Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapat digolongkan ke dalam hak dan kewajiban antara suami istri, dan hak antara orang tua dan anaknya.

a. Hak dan kewajiban antara suami istri

Hak dan kewajiban antara suami istri timbul dari ikatan perkawinan yang mereka lakukan. Hak dan kewajiban ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

i. UU No. 1 Tahun 1974

Dalam UU perkawinan materi tentang hak dan kewajiban merujuk pada hukum islam yang mengandung persamaan hak

dan kewajiban antara suami dan istri. Adapun hak dan kewajiban antara suami istri adalah sebagai berikut:³

- 1) Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak baik suami maupun istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (Pasal 31 ayat 2)
- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. (Pasal 31 ayat 3)
- 5) Suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan bersama. (Pasal 31 ayat 4 dan Pasal 32 ayat 1)
- 6) Suami dan istri wajib saling mencintai , hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain. (Pasal 33)
- 7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 34 ayat 1)

³ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(Pasal 31 ayat 2)

9) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 31 ayat 3)

b. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting maka keputusan diambil oleh suami dan istri secara bersama-sama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan mempelajari pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi si istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

⁴ Kompilasi Hukum Islam

c) Biaya pendidikan bagi si anak.

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Selain itu, suami juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat kediaman untuk istri dan anak-anaknya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa:⁵

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak huni untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga keluarga merasa aman dan tentram. Tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

⁵ *Ibid*

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun suami yang beristri lebih dari satu orang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:⁶

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara seimbang menurut besar dan kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Apabila para istri ikhlas, maka suami dapat menempatkan istri-istrinya di dalam satu tempat kediaman

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan beberapa kewajiban bagi istri nusyuz sebagai berikut :⁷

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam keadaan nusyuz, maka kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

b menjadi tidak berlaku kecuali dalam hal-hal untuk kepentingan anaknya.

- 3) Kewajiban suami seperti tersebut pada ayat (2) di atas menjadi berlaku kembali setelah istri tidak dalam keadaan nusyuz.
- 4) Ketentuan ada atau tidak adanya keadaan nusyuz dari istri harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah.

b. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya

Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun hak dan kewajiban orang tuadan anak adalah sebagai berikut:⁸

- i. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
- ii. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua mereka yang baik.
- iii. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, ketika sudah dalam usia tua.
- iv. Anak yang belum dewasa, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dbawah kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974), anak dibawah umur dan belum pernah

⁸ Pasal 45-49 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

kawin diwakili oleh orang tuanya dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

- v. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali terdapat kepentingan si anak yang menghendakinya.⁹

B. Kajian Tentang Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.¹⁰

Adapun beberapa pengertian perkawinan yang lain sebagai berikut:

⁹ Sudarsono, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

¹⁰ Ali Afandi, 2004, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian**, Jakarta, Renika Cipta, hlm.93

- a. Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹
- b. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam.¹²
- c. Perkawinan adalah akad antara calon laki-istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.¹³
- d. Perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Undang- Undang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai; bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.

¹¹ Republik Indonesia, **Kompilasi Hukum Islam**, Pasal 2

¹² Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, **Hukum dan Hukum Islam**, CV Sinar Sakti, Bandar Lampung, 2007, hlm.129

¹³ Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan dalam Islam**, Hilda Karya Agung, Jakarta, 1986, hlm.1

¹⁴ Ahmad Rofiq, **Hukum Islam di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 60

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tanggal 1 April 1975, maka UU No. 1 tahun 1974 berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Undang-Undang ini bersifat nasional, unikum, karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia.

Adapun asas-asas yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing baik suami maupun istri dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil dalam hidup rumah tangga.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, di samping itu tiap-tiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Asas monogami. Asas ini memiliki pengecualian apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu orang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang

- bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Prinsip calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat pula.
 - e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
 - f. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan di kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami dan isteri.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatunya yang dijalankan menurut hukum yang ada, adalah sah¹⁵.

2. Syarat Perkawinan

Menurut Pasal 14 KHI, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:¹⁶

- a. Calon Mempelai

¹⁵ MR Martiman Prodjohamidjodjo, MM.MA, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, 2011

¹⁶ Simanjuntak. P.N.H, 2015, **Hukum Perdata Indonesia**, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm.80-83

Menurut Pasal 15 KHI, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, yaitu calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari :

- i) Kedua orangtuanya, atau
- ii) Orang tua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau
- iii) Wali, orang yang merawat atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya secara baik, atau
- iv) Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk persetujuan daricalon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau syarat, atau dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 KHI).¹⁷ Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah wajib menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Apabila

¹⁷ Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam

ternyata perkawinan tersebut tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai saja, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan ataupun isyarat yang dapat dimengerti (Pasal 17 KHI).¹⁸

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertugas untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Selanjutnya menurut Pasal 20 KHI, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam, yakni muslim, akil, dan balig. Wali nikah terdiri dari:

i) Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang pertama didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Menurut Pasal 21 Ayat (1) KHI, kelompok tersebut adalah:

- a) Kelompok kerabat laki-laki dengan garis keturunan lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

¹⁸ Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam

- b) Kelompok kerabat dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung dari pihak ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok saudara laki-laki kandung dari pihak kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

ii) Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (Pasal 1 b KHI). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah terdapat putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 KHI).

ii) Saksi Nikah

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan yang dilangsungkan harus

disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁹ Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.²⁰ Saksi harus hadir dalam akad nikah dan menyaksikan secara langsung, serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah diselenggarakan.²¹

iii) Akad Nikah

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi seperti termuat dalam Pasal 1 c Kompilasi Hukum Islam. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu.²² Akad nikah dilangsungkan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wal nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain (Pasal 28 KHI). Orang yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan syarat calon mempelai pria harus memberi kuasa yang tegas dan secara tertulis bahwa wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal

¹⁹ Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam

²¹ Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam

²² Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam

calon mempelai wanita atau wali keberatan atau tidak setuju calon mempelai pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilakukan.²³

C. Kajian Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 UU No.1 tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut.²⁴

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijelaskan lebih lanjut dalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.

²³ Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Mohammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, adalah perceraian yang pengajuan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif dari suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (dkrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975)
- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, adalah perceraian yang pengajuan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam, yang telah pula diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 9 Tahun 1975, adalah perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

2. Asas-Asas Hukum Perceraian

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka UU No. 1 Tahun 1974 hendak mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataannya di masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan suami dan keluarganya dengan istri dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut. Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.²⁵

Pada Pasal 39 ayat (1) dijelaskan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Hal ini sangat jelas menyiratkan bahwa perceraian sangat tidak dikehendaki oleh undang-undang, dengan cara pengadilan atau hakim yang menangani perkara perceraian harus lebih dulu mengupayakan mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak sebelum akhirnya dapat memberikan putusan cerai.

²⁵ *Ibid.* hlm 38

Sedangkan pada Pasal 39 ayat (2) dijelaskan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.” Pada pasal ini ditekankan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan yang diuraikan lebih lanjut pada PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga perceraian tidak dapat terjadi diluar dari alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, hal ini juga memperjelas bahwa Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempersukar terjadinya perceraian yang disiratkan pada Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.²⁶ Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum positif yang merefleksikan asas legalitas bagi proses hukum perceraian adalah UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975. Selain itu, juga telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan

²⁶ *Ibid.* hlm 39

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang Beragama Islam.²⁷

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat tercipta kepastian hukum melalui pembagian pranata dan kelembagaan hukum sesuai dengan kepentingan hukum yang bersangkutan. Adanya peraturan tersendiri mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan tentang kewajiban pegawai pencatatan nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam, maka peraturan tersebut dapat memuat aturan-aturan yang lebih khusus dan terinci mengenai hal-hal terkait terpisah dari undang-undang perkawinan yang hanya memberikan gambaran secara umum tentang aturan-aturan mengenai perkawinan.

c. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

²⁷ *Ibid*, hlm 41-42

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria). Sebaliknya, tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami (pria) dari kesewenang-wenangan istri (wanita) yang berakibat menurunnya marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) suami (pria). Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh UU No.1 Tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik istri (wanita) maupun suami (pria) yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.²⁸

UU No. 1 Tahun 1974 merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melindungi suami dan istri selama dan setelah proses hukum perceraian secara seimbang. Jaminan keseimbangan dalam proses hukum perceraian diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 sehubungan dengan Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Hak dan kedudukan suami yang seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat” dan Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan

²⁸ *Ibid*, hlm 46

perbuatan hukum” serta Pasal 3 ayat (3) yang mendudukkan ”Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”.²⁹

3. Macam-Macam alasan yang dapat dipakai sebagai dasar mengajukan gugatan cerai

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :³⁰

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan terjadi;
- d. salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

²⁹ *Ibid*, hlm 48

³⁰ Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

D. Kajian Tentang Penyakit dan Cacat Badan atau Disabilitas

1. Penyakit

Konsep dari sehat dan sakit sebenarnya tidak terlalu mutlak dan universal karena ada faktor –factor lain diluar kenyataan medis yang mempengaruhinya terutama factor sosial dan budaya. Kedua pengertian tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan pengertian yang satu hanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang lain.

Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi”.³¹ Apabila mengacu pada pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur–unsur fisik, mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan. Sedangkan definisi sakit adalah apabila menderita penyakit menahun (kronis), atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja/kegiatannya terganggu. Walaupun seseorang sakit (istilah sehari-hari) seperti masuk angin, pilek, tetapi bila sakit tersebut tidak

³¹ Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan

mengganggu orang tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, maka ia dianggap tidak sakit.³²

Penyakit sendiri merupakan suatu fenomena kompleks yang berpengaruh negatif terhadap kehidupan manusia. Perilaku dan cara hidup manusia merupakan salah satu penyebab bermacam-macam penyakit yang ada baik dari zaman primitif hingga di zaman masyarakat yang sudah sangat maju peradaban dan kebudayaannya. Apabila ditinjau dari segi biologis penyakit merupakan kelainan berbagai organ tubuh manusia, sedangkan apabila ditinjau dari segi kemasyarakatan keadaan sakit dapat dianggap sebagai penyimpangan perilaku dari keadaan sosial yang normatif. Penyimpangan tersebut dapat disebabkan oleh kelainan biomedis pada organ tubuh atau lingkungan manusia, tetapi dapat juga disebabkan oleh kelainan emosional dan psikososial dari individu yang bersangkutan. Faktor emosional dan psikososial pada dasarnya merupakan akibat dari lingkungan hidup atau ekosistem manusia dan adat kebiasaan manusia atau kebudayaan. Konsep kejadian penyakit ini menurut ilmu kesehatan bergantung pada jenis penyakit. Secara umum konsepsi ini ditentukan oleh banyak faktor antara lain parasit, vektor, manusia dan lingkungannya. Para ahli antropologi kesehatan yang lebih berorientasi ke ekologi, menekankan pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam, tingkah laku penyakit dan cara-cara

³² Sunanti Z. Soejoeti, **Konsep Sehat, Sakit dan Penyakit dalam Konteks Sosial Budaya**, Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI, Jakarta.

tingkah laku penyakit tersebut dapat mempengaruhi evolusi kebudayaannya melalui suatu proses umpan balik (Foster, Anderson, 1978).³³

Sedangkan definisi penyakit menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

a. Dr. Beate Jacob

Menurut Dr. Beate Jacob, penyakit merupakan sebuah penyimpangan dari kondisi tubuh normal menuju ke ketidakharmonisan jiwa.

b. Thomas Timmreck

Penyakit dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana terdapat gangguan terhadap bentuk ataupun fungsi salah satu bagian tubuh yang menyebabkan tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan normal.

c. Azizan Haji Baharuddin

Penyakit dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang disebabkan oleh rusaknya keseimbangan fungsi tubuh dan beberapa bagian badan manusia.

d. Dr. Eko Dudiarto

Penyakit merupakan jejalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk beraksi secara tepat terhadap setiap tekanan ataupun

³³ *Ibid*, hlm 7

rangsanga yang menimbulkan gangguan pada fungsi ataupun struktur organ dan sistem di dalam tubuh.

2. Cacat Badan atau Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun juga sangat beragam. Kementerian Sosial memberikan istilah penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebutnya dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut penyandang disabilitas dengan istilah Penderita cacat.³⁴

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai *“A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”*. Definisi tersebut berarti disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan cara yang dianggap normal oleh manusia pada umumnya, yang diakibatkan oleh penurunan kemampuan.

³⁴ Eko Riyadi, at.al, 2012, Vulnerable Groups: **Kajian dan Mekanisme Perlindungannya**, PUSHAM UII Yogyakarta, hlm, 293.

Selain pengertian secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut :³⁵

- a) *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
- b) *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/ keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/ kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai factor yaitu:³⁶

- a) Cacat didapat (*Acquired*), dapat disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b) Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena pembentukan organ-organ yang mengalami kelainan (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi

³⁵ Coleridge Peter, 2007, **Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.132.

³⁶ Sapto Nugroho, Risnawati Utami, 2008, **Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan**, Yayasan Talenta, Surakarta, hlm.114

buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Melihat pada latar belakang dan rumusan masalah yang di ambil dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dikarenakan peneliti akan mencari kemudian menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum serta menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya,¹ dalam hal ini mengenai kriteria cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu **pendekatan kasus (*case approach*)** yang mana dapat melihat sejauh mana kasus mengenai perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri berkembang dan menjadi suatu permasalahan di masyarakat. Yang kedua adalah **pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah terhadap perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat,² yang dalam hal ini isu yang diangkat adalah

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, KENCANA, Jakarta, 2014, hlm 241.

² *Ibid*

apa kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, konvensi internasional.³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 e
2. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 553/Pdt.G/2008/PA.NGJ
3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1156/Pdt.G/2012/PAJS
4. Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1106/Pdt.G/2012/PAJS
5. Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : 27/Pdt.G/2010/PA.Bky
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33, 34, 38, dan 39
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer, misalnya notulensi pembahasan peraturan

³ Buku Pedoman Penulisan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm 10.

perundang-undangan, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, dan lain-lain.⁴

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jurnal hukum yang ditulis oleh ahli
2. Skripsi/Tesis/Disertasi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus maupun ensiklopedia.⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder atau tersier dapat dilakukan melalui studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang terkait ataupun penelusuran melalui internet.⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan **penafsiran gramatikal** yaitu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian dari perkataan-perkataan yang tersusun dalam suatu ketentuan peraturan hukum, dengan syarat

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

bahwa pengertian dan maksud perkataan yang lazim bagi umumlah yang dipakai sebagai jawabannya. Dan **pendekatan interpretasi sistematis**, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuan untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.⁷

6. Definisi Konseptual

a. Perceraian

Perceraian adalah putusannya suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang berakibat berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

b. Penyakit

Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhi.

c. Cacat Badan atau Disabilitas

Cacat badan atau disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan cara yang dianggap normal oleh manusia pada umumnya, yang diakibatkan oleh penurunan kemampuan.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm 1110.



7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berupa pernyataan singkat mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli serta hasil atau informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, selanjutnya dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah.

BAB I METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi beberapa masukan mengenai hasil tinjauan kea arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Analisis cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri

Seperti yang telah dijelaskan pada kajian pustaka sebelumnya, bahwa cacat badan atau penyakit memang diperbolehkan oleh undang-undang untuk dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, asalkan cacat badan atau penyakit tersebut berakibat tidak dapat dijalankannya kewajiban seorang suami/istri.¹

Terkait kapan cacat badan dan penyakit tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian apakah cacat badan atau penyakit yang didapat sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan, dalam hal ini Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 tidak memberikan keterangan yang jelas. Kemudian apabila dilihat pada Pasal 13 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada Pasal 6 dalam Undang-Undang yang sama, dengan bunyi sebagai berikut :

¹ Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

- 1.) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai
- 2.) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3.) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4.) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- 5.) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini
- 6.) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari uraian kedua pasal tersebut tidak terdapat ketentuan apabila salah satu pihak diketahui memiliki cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang didapat baik sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Hanya disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, yang dapat dimaknai kedua calon mempelai harus saling menerima dan setuju bahwa perkawinan akan dilangsungkan. Meskipun sejatinya pencegahan perkawinan dan putusnya perkawinan adalah dua hal yang berbeda.

Sehingga permasalahan apakah cacat badan atau penyakit yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian adalah cacat badan atau penyakit yang didapat sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan tidak dapat terjawab oleh Undang-Undang. Tetapi apabila melihat pada beberapa putusan pengadilan yang penulis sertakan maka cacat badan atau penyakit yang digunakan sebagai alasan perceraian adalah cacat badan atau penyakit yang didapat sesudah terjadinya perkawinan. Seperti tampak pada Putusan Pengadilan No. 553/Pdt.G/2008/PA Ngj, penggugat menggugat tergugat yang menderita lumpuh yang didapat setelah 7 tahun perkawinan.

Permasalahan selanjutnya yaitu tidak dijelaskan lebih lanjut seperti apa kriteria cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dimaksud pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975. Bagian penjelasan dari pasal 39

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sama persis dengan bunyi Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975, yaitu :²

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa seizing pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena suatu hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan terjadi;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan pada bagian penjelasan dari Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya tertulis cukup jelas tanpa ada penjelasan lebih lanjut khususnya tentang kriteria dari cacat badan atau penyakit yang dimaksud dalam Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975. Sehingga putusannya perkara yang serupa sangat bergantung pada

² Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

interpretasi masing-masing hakim dalam mengartikan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri tersebut.

Sebelum mengetahui apa kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian, terlebih dahulu perlu diketahui masing-masing pengertian dari cacat badan dan penyakit. WHO mendefinisikan cacat badan atau disabilitas sebagai *“A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”*. Definisi tersebut berarti disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan cara yang dianggap normal oleh manusia pada umumnya, yang diakibatkan oleh penurunan kemampuan.

Selain pengertian secara umum, WHO mengemukakan pula definisi disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut :³

- a) *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
- b) *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/ keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya

³ Coleridge Peter, 2007, **Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.132.

sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai factor yaitu:

- a) Cacat didapat (*Acquired*), dapat disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b) Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), dapat disebabkan antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.⁴

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa cacat badan apabila dilihat pengaruhnya terhadap fungsi suami atau istri terbagi atas 2, yaitu :⁵

1. Cacat penghalang fungsi suami istri (alat reproduksi)

Cacat penghalang fungsi alat reproduksi suami istri ini menurut ajaran agama Islam kemudian dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni :

- a. *Al-jabb* adalah cacat berupa terputusnya kelamin (anggota reproduksi).
- b. *Al-'unnah* yaitu kelemahan pada penis yang menghalangi kemampuannya untuk melakukan hubungan suami istri atau dalam

⁴ Sapto Nugroho, Risnawati Utami, 2008, **Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan**, Yayasan Talenta, Surakarta, hlm.114

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, 1989. *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuh*, (Beirut; Daar Al-Fiqh, 1989), Jilid 8, hlm. 514

bahasa medis disebut dengan impoten. Menurut terminologi, Abdul Al-Rahman Al-Jaziri memperjelas *'unnah* ini bahwa seseorang yang dikatakan impoten adalah orang yang tidak sanggup bersetubuh dengan isterinya (tepat pada qubulnya), meskipun kemaluannya itu sudah *intisyar* (bangun tegak) saat ia belum mendekati isterinya.

- c. *Al-Khisha'I* yaitu cacat yang berupa kehilangan atau pecahnya buah dzakar.
 - d. *Rataq (vulva impervia coeunti)* yaitu tersumbatnya lubang vagina sehingga sulitnya melakukan persetubuhan, dalam tinjauan etimologi bahasa Arab artinya adalah "tersumbat". Sedangkan menurut Al-Mawardi *rataq* adalah daging yang tumbuh pada kelamin wanita sehingga menghalangi masuknya penis.
 - e. *Qarn (vulvaianteriorepanieana,soens)*. Menurut bahasa adalah "tanduk", menurut terminologi adalah tulang yang menghalangi rahim, serta menghalangi penetrasinya penis, berupa benjolan tulang atau daging yang tumbuh pada kelamin wanita dan mirip tanduk domba.
2. Cacat yang bukan penghalang fungsi suami istri (alat reproduksi) Jenis penyakit ini tidak menyebabkan terhalangnya fungsi reproduksi namun sangat menjijikan karena salah satu dari suami isteri tidak mungkin dapat mengumpul pasangannya kecuali ia sendiri akan mendapatkan bahaya atau kerugian yang lebih besar, di antaranya adalah:

- a. Kusta (*leprosy*) atau menurut etimologi bahasa Arab disebut *juzam*, artinya adalah kelemahan yang ada pada anggota tubuh dan hidung yang bisa menjalar ke anggota yang lain, sehingga dapat terjadi kerontokkan, bahkan terkadang menular pada keturunan dan pada orang yang mencampurinya.
- b. Sopak (*a piebald skin disease*) atau (*barash*), artinya munculnya keputih-putihan di kulit yang disertai hilangnya darah kulit dan berikot dagingnya. Penyakit ini pun dapat menular pada keturunan dan orang yang mencampurinya.
- c. Gila (*al-Junun*), menurut etimologi bahasa Arab, lafat *al-junuun* memiliki arti *الجنون : زوال العقل* kegilaan. Menurut terminologi artinya hilangnya akal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan hak. Baik gila yang ringan maupun gila yang parah, karena gila yang ringan, meskipun hanya sedikit (sebentar), tetap saja dampaknya dapat menghalang-halangi penderitanya untuk memenuhi hak pada saat itu.

Kemudian Indonesia juga mengatur mengenai cacat badan dalam undang-undang yang disebut dengan undang-undang penyandang disabilitas. Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan pengertian sebagai berikut “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa terdapat 4 macam penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik, dan semuanya harus dialami dalam jangka waktu yang lama. Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan definisi terhadap 4 macam penyandang disabilitas tersebut sebagai berikut : ⁷

- a. **Penyandang Disabilitas fisik** adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebralpalsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. **Penyandang Disabilitas intelektual** adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. **Penyandang Disabilitas mental** adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antarlain: psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuann iteraksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁷ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- d. **Penyandang Disabilitas sensorik** adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Dan semua macam penyandang disabilitas tersebut dialami dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen. Dari beberapa pengertian cacat badan yang telah diuraikan diatas dapat dipahami bahwa Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan pengertian lebih rinci disertai dengan macam-macam penyandang disabilitas yang ada.

Selanjutnya untuk pengertian dari penyakit, ada baiknya lebih dulu dipahami tentang apa itu sehat. Sehat (*health*) adalah konsep yang tidak mudah diartikan sekalipun dapat kita rasakan dan diamati keadaannya. Misalnya, orang tidak memiliki keluhan-keluhan fisik dipandang sebagai orang yang sehat. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa orang yang “gemuk” adalah orang yang sehat dan sebagainya. Jadi faktor subjektifitas dan kultural juga mempengaruhi pemahaman dan pengertian terhadap konsep sehat. Sebagai satu acuan untuk memahami konsep “sehat”, *World Health Organization* (WHO) merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu “keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat”. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Orang yang tidak berpenyakit pun tentunya belum tentu dikatakan

sehat. Dia semestinya dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial.⁸

Sedangkan definisi penyakit menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Dr. Beate Jacob

Menurut Dr. Beate Jacob, penyakit merupakan sebuah penyimpangan dari kondisi tubuh normal menuju ke ketidakharmonisan jiwa.

2. Thomas Timmreck

Penyakit dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana terdapat gangguan terhadap bentuk ataupun fungsi salah satu bagian tubuh yang menyebabkan tubuh menjadi tidak dapat bekerja dengan normal.

3. Azizan Haji Baharuddin

Penyakit dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang disebabkan oleh rusaknya keseimbangan fungsi tubuh dan beberapa bagian badan manusia.

4. Dr. Eko Dudiarto

Penyakit merupakan jejalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk beraksi secara tepat terhadap setiap tekanan ataupun rangsangan yang menimbulkan gangguan pada fungsi ataupun struktur organ dan sistem di dalam tubuh.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut terdapat suatu hal yang mendasar bahwa penyakit ditimbulkan karena adanya suatu penyimpangan, gangguan, atau

⁸ Moeljono Notosoedirjo, Latipun, **Kesehatan Mental**, Edisi keempat, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 3-4

rusaknya fungsi atau mekanisme pada tubuh yang menyebabkan tubuh tidak dapat bekerja dengan normal. Melihat dari definisi tersebut maka sangat beralasan apabila penyakit dalam hal ini yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban sebagai suami/istri dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Dilihat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tubuh yang dapat bekerja dengan normal sangat diperlukan, diantaranya untuk memenuhi nafkah lahir dan batin bagi pasangan dan juga keluarga.

Lebih lanjut pengertian penyakit dapat dilihat dari konsep sehat dan sakit yang dikemukakan oleh Moeljono dan Latipun sebagai berikut :

Konsep “sakit” dalam bahasa kita terkait dengan tiga konsep dalam bahasa inggris, yaitu *disease*, *illness* dan *sickness*. Ketiga istilah ini mencerminkan bahwa kata “sakit” mengandung tiga pengertian yang berdimensi biopsikososial. Secara khusus, *disease* berdimensi biologis, *illness* berdimensi psikologis, dan *sickness* berdimensi sosiologis (Calhoun, *dkk*, 1994).⁹

Kemudian dijelaskan masing-masing pengertian dari tiga konsep tersebut sebagai berikut :¹⁰

- a. *Disease* penyakit berarti suatu penyimpangan yang simptonnya diketahui melalui diagnosis. Penyakit berdimensi biologis dan objektif. Penyakit ini

⁹ Moeljono Notoesodirjo, Latipun, **Kesehatan Mental**, Edisi keempat, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 4

¹⁰ *Ibid* hlm 4

bersifat independen terhadap pertimbangan-pertimbangan psikososial, dia tetap ada tanpa dipengaruhi keyakinan orang atau masyarakat terhadapnya. Tumor, influenza, dan AIDS adalah suatu penyakit. Simptomnya dapat dikenali dari suatu diagnosis, baik dengan menggunakan indera atau menggunakan alat-alat bantu tertentu dalam suatu diagnosis.

- b. *Illness* adalah konsep psikologis yang menunjuk pada perasaan, persepsi, atau pengalaman subjektif seseorang tentang ketidaksehatan atau keadaan tubuh yang dirasa tidak enak. Sebagai pengalaman subjektif, maka *illness* ini bersifat individual. Seseorang yang memiliki atau terjangkit suatu penyakit belum tentu dipersepsi atau dirasakan sakit oleh seseorang tetapi oleh orang lain hal itu dapat dirasakan sakit.
- c. *Sickness* merupakan konsep sosiologis yang bermakna sebagai penerimaan sosial terhadap seseorang sebagai orang yang sedang mengalami kesakitan (*illness* atau *disease*). Dalam keadaan *sickness* ini orang dibenarkan melepaskan tanggung jawab, peran, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dilakukan saat sehat karena adanya ketidaksehatannya. Kesakitan dalam konsep sosiologis ini berkenaan dengan peran khusus yang dilakukan sehubungan dengan perasaan kesakitannya dan sekaligus memiliki tanggung jawab baru yaitu mencari kesembuhan.

Relativitas pengertian masyarakat tentang sehat dan sakit ini dapat kita pahami dari beberapa hal, antara lain bahwa di antara kelompok masyarakat terdapat perbedaan dalam : (1) memahami kondisi sehat atau sakit; (2) memahami penyebab suatu kesakitan; (3) memberi kewenangan orang yang

dapat menetapkan kondisi sehat atau sakit; (4) merespon terhadap kesakitan atau simptomnya; dan (5) menetapkan klasifikasi kesakitan. Akibat dari pemahaman ini, kita tidak mudah menilai seseorang sehat atau sakit atas dasar pengalaman, persepsi, penilaian, atau budaya diri sendiri. Karena itu dalam memberikan penilaian tentang sehat dan sakit ini perlu memperhatikan aspek biopsikososialnya.¹¹

Hal ini memberikan kejelasan mengapa dalam perkara perceraian yang melibatkan cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraianya, hasil putusan dari hakim dapat berbeda-beda. Karena pengertian dari cacat badan dan penyakit itu sendiri yang begitu luas dan sangat relatif bergantung pada pemahaman dan interpretasi masing-masing hakim.

Dari kedua uraian tentang cacat badan dan penyakit tersebut, dapat ditarik kesimpulan sekaligus perbedaan dari pengertian cacat badan atau penyandang disabilitas dan penyakit. Cacat badan adalah keterbatasan seseorang dalam hal fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang didapat seseorang dalam jangka waktu paling singkat 6 bulan dan/atau bersifat permanen, sehingga untuk kemungkinan sembuh pada penyandang disabilitas sangat kecil. Sedangkan penyakit adalah gangguan pada makhluk hidup yang dapat disebabkan oleh bakteri atau virus yang masih mungkin untuk disembuhkan karena tingkatan suatu penyakit yang berbeda-beda mulai dari yang bisa disembuhkan, sukar disembuhkan, hingga tidak dapat disembuhkan.

¹¹ *Ibid* hlm 5

Kemudian setelah mengetahui pengertian dari cacat badan dan penyakit maka yang perlu dimaknai selanjutnya adalah frasa “dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri” dalam rumusan Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban sebagai suami/istri yang dimaksud terdapat pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

Pasal 34

- (1.) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2.) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- (3.) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Namun, penting dipahami bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus suami dan seorang perempuan yang kemudian berstatus sebagai istri, yang secara psikologisosial bertujuan membentuk

keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih dan sayang dan secara teologi-keagamaan kasih dan sayang itu pada hakikatnya adalah kasih dan sayang dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu, sangat konsisten dan logis manakala suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat menjadi alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No. 9 tahun 1975.¹²

Kewajiban yang terdapat pada UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi kewajiban lahir dan batin. Kewajiban lahir dapat berupa pemenuhan kebutuhan material yang diperlukan dalam berumah tangga dan hidup bersama sebagai suami dan istri, memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pasangan, dan segala sesuatu yang bersifat lahiriyah dan dapat dilihat oleh mata. Sedangkan kewajiban batin meliputi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan pemenuhan nafkah batin berupa hubungan badan antara suami istri untuk mendapatkan keturunan.

Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam Islam, selain mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, juga menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan memperoleh keturunan yang sah.¹³ Lebih lanjut, Soemiyati menjelaskan bahwa memperoleh keturunan atau anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia

¹² Muhammad Syaifuddin, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 204

¹³ Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)**, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 12

mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri sendiri dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Dapat dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Walaupun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami istri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan.¹⁴

Maka dari itu sangat wajar apabila seorang suami/istri mengugut cerai pasangannya apabila mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena sudah tidak terpenuhi lagi tujuan perkawinan seperti yang dicita-citakan sebelumnya. Namun sejatinya mengugut cerai merupakan hak setiap orang yang mana pilihan untuk mengugut tersebut sepenuhnya terserah pada pilihan masing-masing individu. Apabila pasangan suami istri menerima kekurangan pasangannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya maka tentu hal tersebut sangat diperbolehkan. Oleh karena itu, jika suatu pasangan hendak menikah sebaiknya terlebih dahulu masing-masing pihak telah mengetahui semua kondisi pasangannya, dalam hal ini apakah

¹⁴ *Ibid* hlm 3

pasangannya tersebut memiliki cacat badan atau penyakit yang nantinya dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka.

D. Kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian

Lalu seperti apa kriteria cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Disini penulis memiliki pandangan berdasarkan pada pengertian cacat badan, penyakit, dan kewajiban suami/istri yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa cacat badan atau dalam undang-undang disebut dengan penyandang disabilitas yang termasuk dalam kriteria tersebut adalah penyandang disabilitas dengan jenis Penyandang Disabilitas Fisik, dan Disabilitas Mental. Sedangkan untuk penyakit yang masuk dalam kriteria tersebut adalah penyakit yang menyebabkan sakit jenis *disease*.

Pada kriteria cacat badan atau penyandang disabilitas, dimasukkannya jenis Penyandang Disabilitas Fisik, dan Penyandang Disabilitas Mental adalah karena jenis-jenis penyandang disabilitas tersebut memungkinkan seseorang untuk tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri sesuai dengan rumusan Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pertama yaitu Penyandang Disabilitas Fisik. Penyandang Disabilitas Fisik yang berupa terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil dapat mengakibatkan seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagai suami/istri yaitu berupa pemenuhan nafkah lahir dan batin.

Nafkah lahir berupa pemenuhan kebutuhan material yang diperlukan dalam berumah tangga dan hidup bersama sebagai suami dan istri, memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pasangan akan sulit dilakukan bagi mereka yang merupakan penyandang disabilitas fisik.

Karena penyandang disabilitas fisik pada umumnya sangat sulit mendapat pekerjaan karena keterbatasannya, sehingga pemenuhan nafkah lahir tidak terpenuhi. Seperti yang diungkapkan oleh Widyaswara Ahli Utama Kemnaker, Sugiarto Sumas, saat membuka sesi interaktif penempatan tenaga kerja khusus bertema "Partisipasi Pencari Kerja Penyandang Disabilitas dan Pemberi Kerja dalam Bursa Kerja" di Hotel Horison Lampung, Kamis (19/10/2017).¹⁵ Sugiarto Sumas mengatakan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia harus dilakukan secara inklusif, artinya siapa saja dan apapun kondisinya berhak mendapat akses ke pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. "Namun dalam kenyataannya, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan disabilitas masih sangat tsedikit. Padahal mempekerjakan penyandangidisabilitasadalahiamanatiUUiNo.8Tahuni2016. Ini jadi tantangan bagi kita semua," Kata Sugiarto.

Ditambahkan Sugiarto dalam menangani disabilitas sesungguhnya bukan hanya di bidang ketenagakerjaan. Tetapi juga harus bersinergi dengan stakeholder lainnya seperti Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja/serikat buruh. "Kita terus mendukung disabilitas diantaranya melalui pemberdayaan pelatihan

¹⁵ <http://kemnaker.go.id> diakses pada 6 Juni 2018 pukul 01.38 WIB

kewirausahaan bagi penyandang disabilitas di Dinas yang menangani ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten/kota. Pemerintah pun memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas melalui jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, "ikatanya.

Pernyataan senada dikemukakan oleh Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kemnaker, Nurahman. Menurutnya meski sudah ada regulasi tentang hak-hak penyandang disabilitas, faktanya masih banyak ditemukan praktek-praktek diskriminasi dalam rekrutmen dan seleksi. "Persoalan umum yang dihadapi penyandang disabilitas adalah sempitnya kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka," katanya.

Kemudian menurut Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) pada tahun 2014 terdapat 1,5 juta pengangguran merupakan penyandang disabilitas. Sedang data lain hasil pendataan yang telah dilakukan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Departemen Sosial RI pada tahun 2008 tercatat sebesar 74,4% penyandang disabilitas adalah pengangguran/tidak bekerja, dan sebesar 25,6% penyandang disabilitas memiliki pekerjaan. Jenis pekerjaan penyandang disabilitas berdasarkan besaran persentase adalah sebagai petani (39,9%), buruh (32,1%) dan jasa (15,1%).¹⁶

Untuk memberikan perlindungan dan rasa aman juga kiranya sangat sulit didapatkan dari penyandang disabilitas fisik karena kembali pada keterbatasannya tersebut, penyandang disabilitas fisik lah yang justru perlu

¹⁶ Sari Dewi Poerwati, **Pengelolaan Tenaga Kerja Untuk Mewujudkan Workplace Inclusion**

dilindungi dan diberikan rasa aman. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah batin juga sama sulitnya untuk dipenuhi oleh penyandang disabilitas fisik. Contoh pada seseorang yang lumpuh atau terkena akibat stroke. Orang tersebut pasti akan sulit untuk melakukan hubungan badan yang merupakan nafkah batin kepada pasangannya. Karena seseorang yang lumpuh jangankan untuk berhubungan badan dan memuaskan pasangannya, bahkan untuk bergerak saja pasti kesulitan.

Yang kedua, pada Penyandang Disabilitas Mental seperti terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang menimbulkan seseorang menjadi gila atau depresi, maka pemenuhan kebutuhan lahir dan batin juga sulit dipenuhi. Penyandang disabilitas jenis ini memiliki emosi yang berubah-ubah bahkan pada tahap gila seseorang bisa tidak mengenali lagi keluarganya dan bertindak apapun sesuai kemauannya tanpa menggunakan akal pikiran. Orang yang mengalami skizofrenia, depresi, atau gangguan mental lainnya dibebaskan dari kewajiban bekerja, atau menjalankan tugas-tugas rutin keluarganya, sama halnya dengan orang yang menderita sakit jantung misalnya. Justru kewajiban mereka adalah beristirahat atau mencari kesembuhan melalui cara-cara yang dapat diterima secara pribadi maupun kultural.¹⁷

Pada kondisi tersebut jangankan untuk bekerja memberi nafkah secara lahir dan batin, untuk menjalin hubungan secara suami istri secara normal saja pasti sudah sangat sulit. Menurut data WHO (2016), terdapat sekitar 35 juta

¹⁷ Moeljono Notoosoedirjo, Latipun, **Kesehatan Mental**, Edisi keempat, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 7

orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia di Indonesia.¹⁸ Menurut Videbeck (2008) gangguan jiwa tipe skizofrenia memiliki karakteristik gejala positif yaitu meliputi adanya waham, halusinasi, disorganisasi pikiran, bicara dan perilaku tidak teratur yaitu berupa perilaku kekerasan. Biasanya perceraian diawali dengan komunikasi antar pasangan yang sudah tidak lagi harmonis, sering bertentangan, dan juga kekerasan. Maka bisa dibayangkan bagaimana komunikasi yang terjadi apabila salah satu pasangan menderita disabilitas mental. Orang-orang dengan disabilitas mental seperti depresi umumnya juga sering melakukan kekerasan terhadap pasangannya dikarenakan tidak dapat mengontrol emosi dan pikirannya saat menghadapi pasangannya.

Mental yang sehat sangat diperlukan dalam membina rumah tangga demi mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manifestasi mental yang sehat (secara psikologis) menurut Maslow dan Mittlemenn adalah sebagai berikut.¹⁹

1. *Adequate feeling of security* (rasa aman yang memadai). Perasaan merasa aman dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial, dan keluarganya.
2. *Adequate self-evaluation* (kemampuan menilai diri sendiri yang memadai), yang mencakup: (a) harga diri yang memadai, yaitu merasa ada nilai yang sebanding pada diri sendiri dan prestasinya, (b) memiliki perasaan berguna, yaitu perasaan yang secara moral masuk akal, dengan

¹⁸ <http://www.depkes.go.id/>, diakses pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 04.40 wib

¹⁹ Moeljono Notosoedirjo, Latipun, **Kesehatan Mental**, Edisi keempat, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 28

perasaan tidak diganggu oleh rasa bersalah yang berlebihan, dan mampu mengenal beberapa hal yang secara sosial dan personal tidak dapat diterima oleh kehendak umum yang selalu ada sepanjang kehidupan di masyarakat.

3. *Adequate spontaneity and emotionally* (memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai, dengan orang lain), hal ini ditandai oleh kemampuan membentuk katan emosional secara kuat dan abadi, seperti hubungan persahabatan dan cinta, kemampuan memberi ekspresi yang cukup pada ketidaksukaan tanpa kehilangan control, kemampuan memahami dan membagi rasa kepada orang lain, kemampuan menyenangkan diri sendiri dan tertawa. Setiap orang adalah tidak senang pada suatu saat, tetap dia harus memiliki alasan yang tepat.
4. *Efficient contact with reality* (memiliki kontak yang efisien dengan realitas) Kontak ini setidaknya mencakup tiga aspek, yaitu dunia fisik, sosial, dan diri sendiri atau internal. Hal ini ditandai (a) tiadanya fantasi yang berlebihan, (b) mempunyai pandangan yang realistis dan pandangan yang luas terhadap dunia, yang disertai dengan kemampuan menghadapi kesulitan hidup sehari-hari, misalnya sakit dan kegagalan, dan (c) kemampuan untuk berubah jika situasi eksternal tidak dapat dimodifikasi. Kata yang baik untuk ini adalah bekerjasama tanpa ditekan (*cooperation with the inevitable*)
5. *Adequate bodily desires and ability to gratify them* (keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya). Hal ini

ditandai dengan (a) suatu sikap yang sehat terhadap fungsi jasmani, dalam arti menerima mereka tetap bukan dikuasai; (b) kemampuan memperoleh kenikmatan kebahagiaan dari dunia fisik dalam kehidupan ini, seperti makan, tidur, dan pulih kembali dari kelelahan; (c) kehidupan seksual yang wajar, keinginan yang sehat untuk memuaskan tanpa rasa takut dan konflik; (d) kemampuan bekerja; (e) tidak adanya kebutuhan yang berlebihan untuk mengikuti dalam berbagai aktivitas tersebut.

6. *Adequate self knowledge* (mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar). Termasuk di dalamnya (a) cukup mengetahui tentang: motif, keinginan, tujuan, ambisi, hambatan, kompensasi, pembelaan, perasaan rendah diri, dan sebagainya; dan (b) penilaian yang realistis terhadap milik dan kekurangan. Penilaian diri yang jujur adalah dasar kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sifat dan tidak untuk menanggalkan (tidak mau mengakui) sejumlah hasrat penting atau pikiran jika beberapa di antara hasrat-hasrat itu secara sosial dan personal tidak dapat diterima. Hal itu akan selalu terjadi sepanjang kehidupan di masyarakat.
7. *Integration and consistency of personality* (kepribadian yang utuh dan konsisten). Ini bermakna (a) cukup baik perkembangannya, kepandaianya, berminat dalam beberapa aktivitas; (b) memiliki prinsip moral dan kata hati yang tidak terlalu berbeda dengan pandangan kelompok; (c) mampu untuk berkonsentrasi; dan (d) tiadanya konflik-konflik besar dalam kepribadiannya dan tidak dissosiasi terhadap kepribadiannya.

8. *Adequate life goal* (memiliki tujuan hidup yang wajar). Hal ini berarti (a) memiliki tujuan yang sesuai dan dapat dicapai; (b) mempunyai usaha yang cukup dan tekun mencapai tujuan; dan (c) tujuan itu bersifat baik untuk diri sendiri dan masyarakat.
9. *Ability to learn from experience* (kemampuan untuk belajar dari pengalaman). Kemampuan untuk belajar dari pengalaman). Kemampuan untuk belajar dari pengalaman termasuk tidak hanya kumpulan pengetahuan dan kemahiran keterampilan terhadap dunia praktik, tetapi elastisitas dan kemauan menerima dan oleh karena itu, tidak terjadi kekakuan dalam penerapan untuk menangani tugas-tugas pekerjaan. Bahkan lebih penting lagi adalah kemampuan untuk belajar secara spontan.
10. *Ability to satisfy the requirements of the group* (kemampuan memuaskan tuntutan kelompok). Individu harus: (a) tidak terlalu menyerupai anggota kelompok yang lain dalam cara yang dianggap penting oleh kelompok; (b) terinformasi secara memadai dan pada pokoknya menerima cara yang berlaku dari kelompoknya; (c) berkemauan dan dapat menghambat dorongan dan hasrat yang dilarang kelompoknya; (d) dapat menunjukkan usaha yang mendasar yang diharapkan oleh kelompoknya: ambisi, ketepatan; serta persahabatan, rasa tanggung jawab, kesetiaan, dan sebagainya, serta (e) minat dalam aktivitas rekreasi yang disenangi kelompoknya.

11. *Adequate emancipation from the group or culture* (mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya). Hal ini mencakup: (a) kemampuan untuk menganggapi sesuatu itu baik dan yang lain adalah jelek setidaknya; (b) dalam beberapa hal bergantung pada pandangan kelompok; (c) tidak ada kebutuhan yang berlebihan untuk membujuk (menjilat), mendorong, atau menyetujui kelompok; dan (d) untuk beberapa tingkat toleransi; dan menghargai terhadap perbedaan budaya.

Dari sebelas poin tersebut dapat diketahui bahwa mental yang sehat akan memiliki manifestasi atau mewujudkan hasil yang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang dalam hal ini untuk kehidupan keluarganya. Seseorang dengan mental yang baik akan memiliki rasa aman terhadap hubungan keluarganya, memiliki perasaan yang secara moral masuk akal, mampu membentuk ikatan emosional secara kuat dan abadi, mampu memberi ekspresi yang cukup pada ketidaksukaan tanpa kehilangan kontrol, mampu memahami dan membagi rasa dengan orang lain, mampu menghadapi kesulitan hidup sehari-hari, mampu memperoleh kehidupan seksual yang wajar, mampu untuk bekerja, dan mampu untuk berkonsentrasi. Dengan demikian sangat wajar apabila seseorang ingin bercerai dengan pasangannya yang memiliki disabilitas mental karena sejumlah manifestasi mental yang sehat tersebut tidak dapat terwujud sehingga kewajiban sebagai suami/istri juga tidak dapat dipenuhi.

Kendati demikian, seorang penyandang disabilitas fisik maupun mental sebenarnya bisa saja berkeluarga memiliki suami/istri selama kondisi

mereka tersebut diterima oleh pasangannya. Karena kembali seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perceraian adalah pilihan masing-masing individu dan bukan suatu keharusan. Maka perlu pengertian dan kejujuran dari masing-masing pihak baik suami atau istri untuk saling menerima kekurangan pasangan masing-masing demi mencapai tujuan perkawinan. Kejujuran seperti saling terbuka akan kekurangan masing-masing sebelum dilangsungkan perkawinan juga diharapkan bisa mengurangi adanya kemungkinan untuk bercerai di kemudian hari.

Tidak dimasukkannya jenis Penyandang Disabilitas Intelektual dan Penyandang Disabilitas Sensorik dalam kriteria adalah karena penderita keduanya masih dimungkinkan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami/istri yaitu memberikan nafkah lahir dan batin. Pada penyandang disabilitas intelektual seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom* masih mungkin untuk memenuhi nafkah lahir dengan bekerja. Dibuktikan dengan beberapa penderita *down syndrom* yang masih bisa bekerja diantaranya Angela Bachiller yang menjabat sebagai anggota dewan di Spanyol pada usia 30 tahun di tahun 2013, Katie Higgins menjadi instruktur zumba di Halifax College, Zhou Zhou menjadi seorang konduktor profesional, Noelia Garella yang berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Manajemen Organisasi dan menjadi guru TK di Argentina, Tim Harris seorang pengusaha restoran di

Amerika Serikat.²⁰ Beberapa orang tersebut hanya sebagian contoh dari penderita *down syndrom* yang masih bisa bekerja.

Pada Penyandang Disabilitas Sensorik seperti terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara juga masih mungkin untuk memenuhi nafkah lahir dengan bekerja. Karena penderita disabilitas jenis ini hanya memiliki kekurangan pada salah satu panca inderanya saja, sehingga masih banyak jenis pekerjaan yang bisa dilakukan bagi penyandang disabilitas sensorik. Begitu pula dengan nafkah batin, penyandang disabilitas sensorik tidak memiliki masalah yang berarti untuk melakukan hubungan badan dan memiliki keturunan karena hanya salah satu panca inderanya saja yang terganggu atau tidak berfungsi.

Hal ini serupa dengan putusan hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 553/Pdt.G/2008/PA.NGJ. Dalam putusan ini penggugat dan tergugat telah menikah sejak tahun 2000 dan belum dikaruniai keturunan sampai gugatan diajukan. Awalnya pengugat dan tergugat hidup harmonis hingga pada awal tahun 2007 tergugat mengalami kecelakaan sepeda motor dan menyebabkan tergugat mengalami kelumpuhan. Setelah dirawat di rumah sakit tergugat tidak lantas pulang ke rumahnya bersama dengan penggugat melainkan dibawa pulang ke rumah orang tua tergugat karena dilarang oleh orang tua tergugat. Karena penggugat dan tergugat sudah memiliki rumah sendiri maka penggugat berniat meminta tergugat untuk pulang ke rumah bersama penggugat namun tergugat tidak mau dan bahkan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian. Sejak

²⁰ <http://www.terkini.com> , diakses pada tanggal 6 Juni 2018, pukul 08.29 wib

saat itu tergugat tidak pernah pulang selama 9 bulan dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta di pengadilan, hakim berpendapat bahwa kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah tidak saling mengunjungi dan putusnya hubungan antara keduanya selama 7 bulan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan Penggugat lahir dan bathin hal tersebut dapat dipahami karena Tergugat dalam keadaan sakit, selain itu pula keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dapat dibenarkan oleh hukum karena sulitnya memperkirakan kapan Tergugat dapat sembuh dan pentingnya status Penggugat guna memperoleh kepastian perlindungan dari pihak lain tanpa dihalangi hubungan hak dan kewajiban dengan Tergugat. Dilihat dari penyakit Tergugat yaitu menderita kelumpuhan yang hanya bisa berbaring di tempat tidur dan telah 7 bulan lebih ternyata belum dapat disembuhkan maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menderita cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, disamping itu Penggugat dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat meski dalam hal ini mejelis hakim telah selalu menasehatinya. Maka hakim dalam perkara tersebut memutus dengan menggunakan Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejatinya perlindungan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diantaranya memuat tentang kesamaan hak dalam segala aspek.

Namun sepertinya baik pemerintah maupun elemen-elemen penunjang lainnya masih harus berusaha keras untuk mewujudkan hal tersebut karena dalam paraktiknya kesamaan hak untuk penyandang disabilitas masih jauh dari yang diharapkan.

Sedangkan pada kriteria penyakit, dimasukannya penyakit yang menimbulkan sakit jenis *disease* adalah karena jenis sakit ini berdimensi biologis dan objektif, yang diketahui melalui diagnosis medis dan memungkinkan seseorang yang mengidap penyakit ini menjadi tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Memungkinkan karena tidak semua *disease* mengakibatkan seseorang menjadi tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Berbeda dengan penyakit yang menimbulkan sakit jenis *illness* dan *sickness*, keduanya hanya sebatas sakit dalam konsep psikologis dan sosiologis. *Illness* menunjuk pada perasaan, persepsi, atau pengalaman subjektif seseorang tentang ketidaksehatan atau keadaan tubuh yang dirasa tidak enak, dan *sickness* bermakna sebagai penerimaan sosial terhadap seseorang sebagai orang yang sedang mengalami kesakitan (*illness* atau *disease*). Sehingga keduanya tidak menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Salah satu contoh penyakit jenis *disease* yang dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri salah satunya adalah HIV. Karena HIV tergolong penyakit berat yang sulit bahkan tidak dapat disembuhkan yang dapat menular ke pasangan sehingga tidak hanya menghalangi seseorang untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

dalam hal ini adalah nafkah batin, tetapi juga dapat membahayakan nyawa pasangan. HIV merupakan virus sitopatik dari famili retrovirus. Transmisi HIV masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 cara, yaitu: (1) secara vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke anak (selama mengandung, persalinan, menyusui); (2) secara transeksual (homoseksual maupun heteroseksual); (3) secara horizontal yaitu kontak antardarah atau produk darah yang terinfeksi (asas sterilisasi kurang diperhatikan terutama pada pemakaian jarum suntik bersama-sama secara bergantian, tato, tindik, transfusi darah, transplantasi organ, tindakan hemodialisis, perawatan gigi). HIV dapat disolasi dari darah, semen, cairan serviks, cairan vagina, ASI, air liur, serum, urine, air mata, cairan alveolar, cairan serebrospinal. Sejauh ini transmisi secara efisien terjadi melalui darah, cairan semen, cairan vagina dan serviks, ASI.²¹

Penyakit infeksi HIV & AIDS masih merupakan masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia. Masalah yang berkembang sehubungan dengan penyakit infeksi HIV & AIDS adalah angka kejadian dan kematian yang masih tinggi. Meskipun telah dicapai berbagai kemajuan di bidang kedokteran dan farmasi, serta telah dilakukan berbagai upaya pencegahan primer maupun sekunder, tetapi angka kesakitan dan kematiannya tetap tinggi. Menurut WHO, hingga Desember 2000, dilaporkan 58 juta jiwa penduduk dunia terinfeksi HIV, dalam kurun waktu tersebut 22 juta jiwa meninggal atau 7.000 jiwa meninggal

²¹ Nasronudin, **HIV & AIDS PENDEKATAN BIOLOGI MOLEKULER, KLINIS, DAN SOSIAL EDISI 2**, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm 21

akibat AIDS setiap hari. Transmisi HIV masih tetap saja berlangsung hingga kini, 16.000 jiwa terinfeksi baru setiap harinya.²²

Pemahaman masalah AIDS oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia masih jauh dari harapan, tidak seimbang dengan derasny arus informasi dari pers Barat yang memengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia. Penyakit infeksi HIV & AIDS kini telah hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, tetapi rupanya belum sepenuhnya diterima secara wajar seperti penyakit lain pada umumnya. Dampaknya ODHA (Orang dengan HIV & AIDS) harus menanggung beban semakin berat, tidak saja akibat intervensi HIV ke dalam tubuhnya, tetapi juga beban psikologis akibat stigma dan diskriminasi.²³

Impotensi menurut penulis tidak termasuk dalam kriteria yang dimaksud dalam Pasal 19 e PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Impotensi adalah ketidakmampuan yang menetap atau terus-menerus untuk mencapai atau mempertahankan ereksi penis yang berkualitas sehingga dapat mencapai hubungan seksual yang memuaskan.²⁴ Penyebab impotensi multifaktor dan sangat beragam karena factor usia, penggunaan obat-obatan, pola makan yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak benar, dan lain-lain.²⁵

Impotensi masih mungkin untuk disembuhkan melalui pengobatan bertahap pada dokter yang ahli dalam bidangnya. Impotensi bukan penyakit

²² *Ibid* hlm 43

²³ *Ibid* hlm 391

²⁴ Dito Anurogo & Ari Wulandari, **Cara Jitu Mengatasi Impotensi**, C.V. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2011, hlm 30

²⁵ *Ibid* hlm 35

menurun. Oleh karena itu, pencegahan sangat penting dilakukan agar terhindar dari impotensi. Namun demikian kalau seorang lelaki sudah terkena impotensi, dia tidak harus panic berlebihan. Penanganan medis dan berbagai terapi dapat dilakukan untuk menyembuhkannya.²⁶ Ada berbagai cara atau pengobatan yang dapat ditempuh oleh penderita impotensi diantaranya dengan menjalani gaya hidup sehat, menggunakan pompa vakum, operasi pengalihan pembuluh darah dan implantasi, pemberian Nerve Growth Factor (NGF), terapi nutrisi, terapi listrik, dan lain-lain.²⁷ Sehingga impotensi hanya sebatas gangguan seksual yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga hingga menimbulkan perceraian, bukan merupakan cacat badan atau penyakit seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 19 e PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal ini serupa dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1156/Pdt.G/2012/PAJS, Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1106/Pdt.G/2012/PA.Mlg, dan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 27/Pdt.G/2010/PA.Bky. Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1156/Pdt.G/2012/PAJS penggugat dan tergugat telah menikah selama 1 tahun tetapi tidak pernah sama sekali melakukan hubungan suami istri. Terlebih lagi tergugat juga tidak pernah memberi nafkah secara finansial kepada penggugat sejak mulai menikah sampai gugatan diajukan. Selama pernikahan tergugat juga sering bersikap kasar terhadap penggugat. Diketahui pula dari para

²⁶ *Ibid* hlm 155

²⁷ *Ibid* hlm 177-184

saksi bahwa ternyata tergugat adalah seorang homoseksual dan telah diakui pula oleh tergugat. Dalam kondisi seperti itu akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian. Dalam memutus perkara tersebut hakim mempertimbangkan bahwa dengan adanya perselisihan secara terus menerus yang diawali dengan penggugat dan tergugat yang tidak pernah melakukan hubungan suami istri, lalu tergugat yang tidak pernah memberi nafkah secara finansial, dan tergugat yang terbukti homoseksual, maka tujuan perkawinan yang semula diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat lagi terpenuhi. Melihat dari perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak mungkin lagi bersatu antara pihak suami dan istri maka hakim memutus perkara tersebut dengan Pasal 19 F PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian pada Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1106/Pdt.G/2012/PA.Mlg, penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2011 terjadi perselisihan yang dikarenakan tergugat membohongi penggugat dimana tergugat bukan laki-laki tapi seorang waria dan berdandan seperti perempuan, tergugat sering marah-marah, kasar, kurang memperhatikan penggugat beserta anaknya. Ketika melakukan hubungan suami istri nafsu tergugat tidak ada, dan sering menggunakan obat-obatan pendukung. Dan jika berhubungan tergugat meminta dari belakang (dubur). Dengan alasan seperti itu hakim tetap memutus perkara tersebut menggunakan Pasal 19 F PP

No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pertimbangan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri. Meskipun alasan perceraian seperti yang dijelaskan sebelumnya dan didukung oleh keterangan para saksi, tidak dapat dibantah oleh tergugat.

Lalu yang ketiga pada Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor : 27/Pdt.G/2010/PA.Bky, pasangan suami istri telah menikah sejak tahun 2006 dan belum dikaruniai keturunan, lalu pada tahun 2008 pihak suami sebagai tergugat mulai menderita penyakit impotensi sehingga mengganggu hubungan suami istri antara pihak suami sebagai tergugat dan pihak istri sebagai penggugat. Dan penggugat telah menyarankan kepada tergugat untuk berobat, namun setelah dalam tempo 2 bulan ternyata penyakit tak kunjung sembuh. Setelah kejadian tersebut, sejak bulan Januari 2009 tergugat membawa penggugat ke orang tuanya dengan alasan penyakit tergugat yang belum sembuh, dan sejak gugatan diajukan sudah kurang lebih 1 tahun tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada penggugat. Pada perkara ini hakim memutuskan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh

karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Dari sejumlah putusan pengadilan dengan permasalahan serupa tersebut dapat dipahami bahwa homoseksual, waria, dan impotensi tidak termasuk dalam kriteria cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, gangguan seksual seperti impotensi, homoseksual, dan waria hanya sebatas pemicu dari tidak harmonisnya suatu hubungan suami istri, sehingga timbulnya perselisihan atau pertengkaran. Maka hakim tidak salah dalam memutus perkara demikian menggunakan Pasal 19 F PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena akibat dari gangguan seksual tersebut memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang jika tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai.

Oleh karena alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ini butuh ketelitian maka bukti-bukti yang mendukung fakta-fakta tentang cacat badan atau penyakit tersebut juga sangat penting peranannya. Dalam hal ini tentunya dokter atau tenaga ahli lainnya yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan keterangan langsung atau keterangan tertulis seperti surat dokter yang menyatakan bahwa seseorang dinyatakan positif memiliki cacat badan atau

penyakit tertentu. Sehingga hakim dalam memutus perkara dapat lebih mudah dan tepat dalam menerapkan hukum.

C. Rumusan Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975 yang sesuai setelah diketahui kriteria dari cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri

Peraturan tentang cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 e PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah diuraikan sebelumnya bagaimana pengertian cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri yang dimaksud dalam pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Pasal 19 e tersebut kurang memberikan rumusan yang lengkap dan masih terlalu luas. Bunyi pasal 19 e PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”.

Dari rumusan pasal tersebut belum nampak apa kriteria cacat badan atau penyakit yang dimaksud, begitu pula pada bagian penjelasan pasal tersebut hanya tertulis sudah jelas. Maka dari itu penulis memiliki usulan bagaimana peraturan mengenai cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya pada pasal 19 e tersebut agar lebih jelas dalam hal kriteria cacat badan atau penyakit yang dimaksud. Berdasarkan dari uraian tentang pengertian cacat badan dan penyakit yang dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, serta didukung oleh beberapa putusan pengadilan terkait maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Pasal 19 e PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri adalah cacat badan atau penyandang disabilitas dengan jenis penyandang disabilitas fisik dan disabilitas mental. Yang termasuk dalam disabilitas fisik antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), atau akibat stroke. Sedangkan yang termasuk dalam disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, atau gila.

Lalu pada kriteria penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dimaksud dalam Pasal 19 e PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penyakit yang menyebabkan sakit jenis *disease*. Untuk pengertian *disease* itu sendiri nantinya dapat dimasukkan padabagian penjelasan dari Pasal 19 e. Tentunya tidak semua penyakit yang menyebabkan sakit jenis *disease* dapat dimasukkan dalam kriteria yang dimaksud oleh Pasal 19 e, hanya penyakit yang dapat menghalangi seseorang dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri atau penyakit berbahaya yang dapat menular ke pasangan sehingga

bukan saja membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan pasangan yang masuk dalam kriteria seperti HIV & AIDS. Untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar menderita cacat badan atau penyakit seperti yang dimaksud maka diperlukan bukti yang mendukung untuk menguatkan pilihan hakim nantinya dalam menggunakan pasal tersebut untuk memutus perkara terkait.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah keterangan dokter atau tenaga ahli yang memiliki kewenangan dan keahlian yang sesuai, atau bisa pula menggunakan surat dokter yang menunjukkan bahwa seseorang dinyatakan positif memiliki cacat badan atau penyakit yang sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dapat menutupi kelemahan dari Pasal 19 e karena tidak ada dalam rumusan pasal tersebut yang mengharuskan cacat badan atau penyakit untuk dibuktikan secara medis. Disertakan bukti berupa surat dokter juga diharapkan dapat meminimalisir adanya diskriminasi terhadap pihak yang dituduh memiliki cacat badan atau penyakit hanya melalui keterangan saksi tanpa dibuktikan secara medis.

Maka perubahan pada rumusan Pasal 19 e PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diusulkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak mendapat (a) cacat badan yaitu cacat badan fisik atau mental atau; (b) penyakit yang menimbulkan sakit jenis *disease* yang berbahaya atau dapat menular ke pasangan, yang keduanya harus dibuktikan secara medis. Sehingga dengan cacat

badan atau penyakit tersebut dapat berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”.

Lalu pada bagian penjelasan dari pasal tersebut diberi pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan *disease* yaitu, “*Disease* penyakit berarti suatu penyimpangan yang simptomnya diketahui melalui diagnosis. Penyakit berdimensi biologis dan objektif. Penyakit ini bersifat independen terhadap pertimbangan-pertimbangan psikososial, dia tetap ada tanpa dipengaruhi keyakinan orang atau masyarakat terhadapnya”.²⁸ Simptom berarti keadaan khusus kondisi tubuh yang menunjukkan tanda adanya suatu penyakit, gejala penyakit.²⁹



²⁸ Moeljono Notosoedirjo, Latipun, **Kesehatan Mental**, Edisi keempat, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm 4

²⁹ kbbl.web.id diakses pada tanggal 30 mei 2018 pukul 04.29 wib

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah cacat badan atau penyandang disabilitas dengan jenis penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental dan penyakit yang menyebabkan sakit jenis *disease* yang dapat menghalangi seseorang dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri atau penyakit berbahaya yang dapat menular ke pasangan sehingga bukan saja membahayakan diri sendiri tetapi juga membahayakan pasangan seperti HIV & AIDS, yang dibuktikan dengan keterangan dokter atau tenaga ahli yang memiliki kewenangan dan keahlian yang sesuai, atau bisa pula menggunakan surat dokter yang menunjukkan bahwa seseorang dinyatakan positif memiliki cacat badan atau penyakit yang sesuai. Impotensi tidak termasuk dalam kriteria penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri karena impotensi hanya sebatas gangguan seksual.

Sehingga rumusan Pasal 19 e PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak mendapat (a) cacat badan yaitu cacat badan fisik atau mental atau; (b) penyakit yang menimbulkan sakit jenis *disease* yang berbahaya atau dapat menular ke pasangan, yang keduanya harus dibuktikan secara medis. Sehingga dengan cacat badan atau penyakit

tersebut dapat berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri”. Pada bagian penjelasan diberi pengertian yang dimaksud dengan *disease* yaitu, “*Disease* penyakit berarti suatu penyimpangan yang simptomnya diketahui melalui diagnosis. Penyakit berdimensi biologis dan objektif. Penyakit ini bersifat independen terhadap pertimbangan-pertimbangan psikososial, dia tetap ada tanpa dipengaruhi keyakinan orang atau masyarakat terhadapnya”. Simptom berarti keadaan khusus kondisi tubuh yang menunjukkan tanda adanya suatu penyakit, gejala penyakit.

B. SARAN

1. Bagi Hakim

Untuk berani menggunakan Pasal 19 e PP no. 1 tahun 1975 dalam memutus perkara perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Dan juga agar hakim dalam menangani perkara perceraian dengan alasan cacat atau penyakit tersebut untuk meminta bukti secara medis kepada pihak yang bersangkutan.

2. Pencari Keadilan

Dalam mengajukan gugatan perceraian untuk menyertakan bukti secara medis untuk memperkuat pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rofiq, **Hukum Islam di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Ali Afandi, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian**, Renika Cipta, Jakarta, 2004
- A. Ma'mun Rauf, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Hukum Islam II)**, Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LEPPEN) Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1990
- Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, **Hukum dan Hukum Islam**, CV Sinar Sakti, Bandar Lampung, 2007
- Asep Saepudin, Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Arifin, **Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis**, Kencana, Jakarta, 2013
- Buku Pedoman Penulisan**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015
- Coleridge Peter, **Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Dito Anurogo & Ari Wulandari, **Cara Jitu Mengatasi Impotensi**, C.V. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2011
- Eko Riyadi, et.al, **Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya**, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- Komariah, **Hukum Perdata**, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008
- Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan dalam Islam**, Hilda Karya Agung, Jakarta, 1986
- Moeljono Notoosoedirjo, Latipun, **Kesehatan Mental Edisi keempat**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2014
- MR Martiman Prodjohamidjodjo, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Selatan, 2011
- Muhammad Syaifuddin, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Mustofa Hasan, **Pengantar Hukum Keluarga**, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011

Nasronudin, **HIV & AIDS PENDEKATAN BIOLOGI MOLEKULER, KLINIS, DAN SOSIAL EDISI 2**, Airlangga University Press, Surabaya, 2014

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, KENCANA, Jakarta, 2014

Riduan Syahrani, **Seluk-beluk Asas-asas Hukum Perdata**, PT Alumni, Banjarmasin, 2006

Sapto Nugroho, Risnawati Utami, **Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan**, Yayasan Talenta, Surakarta, 2008

Sari Dewi Poerwati, **Pengelolaan Tenaga Kerja Untuk Mewujudkan Workplace Inclusion**

Simanjuntak. P.N.H, **Hukum Perdata Indonesia**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)**, Liberty, Yogyakarta, 1982

Sudarsono, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Sunanti Z. Soejoeti, **Konsep Sehat, Sakit dan Penyakit dalam Konteks Sosial Budaya, Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan**, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008

Wahbah Az-Zuhaili, **Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuh**, Beirut; Daar Al-Fiqh, 1989

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 69

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

INTERNET

<http://kamusbahasaIndonesia.org>

<http://kemnaker.go.id>

<http://www.depkes.go.id>

<http://www.terkini.com>

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 553/Pdt.G/2008/PA.NGJ

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1156/Pdt.G/2012/PAJS

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1106/Pdt.G/2012/PAJS

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 27/Pdt.G/2010/PA.Bky

